

KAJI MODEL METODE PENYULUHAN DI ERA BERLAKUNYA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) MELALUI SISTIM PENYULUHAN YANG BERSINERGI, TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

Nurliana Harahap, Widi Hardjono, Karim Tarigan

*Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan
Jalan Binjai Km 10 Tromol Pos 18 Medan 20002*

ABSTRACT

The role of agricultural extension is currently perceived to be increasingly important and quite a strategic role in supporting the agricultural sector. Extension workers as the pioneer of agricultural development, which have function as an agent of change as an educator, communicator, facilitator for farmers. Based on the experiences, implementation of education in Indonesia has undergone various phases of dynamics ranging from the heyday ever achieved in 1984 upon attainment of rice self-sufficiency, the agent during the nadir of the most low and to begin the revival period with the implementation of the extension methods different- depending on each phase. This study aims to produce a "model of the future are synergistic extension, integrated and sustainable". This research was conducted in three districts of food production centers in North Sumatera province namely Deli Serdang, Serdang Bedagai and Simalungun from June to December 2014. This study was a qualitative research and supported with descriptive analysis. The research strategy is a case study with the aim to conduct in-depth study of the object is limited. The results of this study showed that proper counseling method to be applied in the era of the enactment of the AEC is a method of "Lakukorsiva" or exercises, visits, Coordination and Communication, Supervision and Evaluation ".

Keywords : Extension Methods, AEC, Synergy, Integrated and Sustainable

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peran strategis karena kontribusinya yang besar dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Untuk terus meningkatkan perannya, telah ditetapkan Visi Pertanian 2010 – 2014 yaitu Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Ekspor dan Kesejahteraan Petani. Dalam rangka mewujudkan Visi Pertanian, dikembangkan 10 (sepuluh) Misi Pertanian 2010 – 2014 dan 2 (dua) diantaranya terkait secara langsung dengan kualitas pengembangan sumber daya manusia pertanian, yaitu (1) menjadikan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri, serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi, dan (2) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Penyuluh Pertanian merupakan barisan terdepan dari Kementerian Pertanian yang

merupakan ujung tombak pembangunan pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian diharapkan mampu sebagai motivator yang agresif dalam mentransfer teknologi kepada para petani melalui kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang dipimpin oleh seorang KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)

Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia pernah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai program pembangunan pertanian. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 1984 Indonesia mampu berswasembada beras dengan revolusi hijau. Keberhasilan itu dilakukan melalui koordinasi yang ketat dengan instansi terkait. Selain hal tersebut metode penyuluhan yang pernah diterapkan di Indonesia juga bermacam-macam dimana masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan. Dari pengalaman sejarah tercatat bahwa perjalanan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di Indonesia dapat dikatakan telah mengalami berbagai perubahan mulai dari tahap pembangunan, berjaya dan bahkan pernah

mengalami pada titik nadir yang paling rendah dan kemudian kembali bangkit dari keterprukan dengan ditandai lahirnya Undang-undang Penyuluhan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu model pelaksanaan penyuluhan ke depan terutama dalam menyambut berlakunya AEC.

Penelitian bertujuan untuk untuk menghasilkan suatu “model penyuluhan kedepan yang bersinergi, terintegrasi dan berkelanjutan” sehingga dapat mendukung pembangunan pertanian.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah sentra produksi tanaman pangan khususnya padi yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan pendekatan analisisnya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan tujuan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap obyek yang terbatas. Responden dalam penelitian ini terdiri dari penyuluh, petani, dinas terkait dan tokoh masyarakat dari tiga kabupaten yang terlibat langsung dengan kegiatan penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Responden

Responden yang ditunjuk dalam penelitian ini diberikan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan penyuluhan yakni dari petani, penyuluh dan pejabat atau pemangku kebijakan dari instansi terkait. Secara rinci jumlah data responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penyuluh responden dari tiga kabupaten bervariasi antara tingkat SLTA, Diploma sampai S1. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penyuluh pada tingkat SLTA sebanyak 37 orang atau setara dengan 34,9 (%), tingkat pendidikan Diploma II/Diploma III sebanyak 5 orang atau 4,7 % sedangkan tingkat pendidikan DIV/S1 sebanyak 64 orang atau 60,4 %. Tingkat pendidikan formal penyuluh akan menunjukkan perbedaan tingkat pengetahuan penyuluh dalam melaksanakan tugas, sehingga yang berpendidikan lebih tinggi mampu berpikir lebih abstrak dan memiliki wawasan yang lebih luas. Pendidikan yang lebih tinggi akan berpengaruh pada tingkat adaptasi, mempunyai pilihan-pilihan yang lebih luas dalam kehidupannya, termasuk dalam melaksanakan penyuluhan. Hal tersebut senada dengan pendapat Slamet (1992) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, ada kecenderungan semakin tinggi pula pengetahuan, sikap dan keterampilan, efisien bekerja dan semakin banyak tahu cara-cara dan teknik bekerja yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

Penyuluh berperan sebagai agen pembaharu (*change agent*) dan sebagai sumber informasi dan teknologi yang akan mentransfer kepada petani. Sesuai dengan pernyataan Mardikanto (2009) mengatakan bahwa tingkat pendidikan akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menguasai teknologi dan pola pikir.

Tabel 1. Jumlah Data Responden Pada Wilayah Penelitian

No	Kabupaten	Nama BPP	Responden			Total Responden (orang)
			Petani	Penyuluh	Instansi terkait	
1	Deli Serdang	Hamp. Perak	26	11	10	47
		Jaharun	30	17		47
2	Serdang Bedagai	Pem. Sijonam	42	38	8	88
		Berohol	40	20		60
3	Simalungun	Panei	17	14	15	46
		Bandar	40	6		46
Total			195	106	33	334

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 2. Sebaran Data Penyuluh Berdasarkan Pendidikan

No	Kabupaten	Nama BPP	Jlh Penyuluh responden (orang)	Pendidikan			Persentase		
				SLTA	D3	DIV/S1	SLTA	D3	DIV/S1
1	Deli Serdang	Hamp. Perak	11	3	-	8	27,3	-	72,7
		Jaharun	17	8	-	9	47	-	53
2	Serdang Bedagai	Pem. Sijonam	38	12	2	24	31,6	5,5	63,2
		Berohol	20	5	3	12	25	15	60
3	Simalungun	Panei	14	7	-	7	50	-	50
		Bandar	6	2	-	4	33,3	-	66,7
Jumlah			106	37	5	64			

Sumber : Data Primer

Tabel 3. Sebaran Data Penyuluh Berdasarkan Pendidikan

No	Kabupaten	Nama BPP	Jlh Penyuluh responden (orang)	Pendidikan			Persentase		
				SLTA	D3	DIV/S1	SLTA	D3	DIV/S1
1	Deli Serdang	Hamp. Perak	11	3	-	8	27,3	-	72,7
		Jaharun	17	8	-	9	47	-	53
2	Serdang Bedagai	Pem. Sijonam	38	12	2	24	31,6	5,5	63,2
		Berohol	20	5	3	12	25	15	60
3	Simalungun	Panei	14	7	-	7	50	-	50
		Bandar	6	2	-	4	33,3	-	66,7
Jumlah			106	37	5	64			

Sumber : Data Primer

Tabel 4. Sebaran Data Penyuluh responden berdasarkan umur

No	Kabupaten	Nama BPP	Jlh Penyuluh (orang)	Range Umur (thn)			
				20-30	31-40	41-50	51-60
1	Deli Serdang	Hamp. Perak	11	3	2	2	4
		Jaharun	17	-	5	10	2
2	Serdang Bedagai	Pem. Sijonam	38	6	16	10	6
		Berohol	20	2	10	5	3
3	Simalungun	Panei	14	2	8	1	3
		Bandar	6	-	3	3	-
Jumlah			106	13	44	31	18

Sumber : Data Primer

Tabel 5. Sebaran Data Penyuluh Responden Berdasarkan Masa Tugas

No	Kabupaten	Nama BPP	Jlh Penyuluh (orang)	Masa tugas (tahun)				
				0-5	6-10	11-15	16-20	≥ 21
1	Deli Serdang	Hamp. Perak	11	1	7	-	-	3
		Jaharun	17	2	9	-	6	
2	Serdang Bedagai	Pem. Sijonam	38	4	30	-	4	
		Berohol	20	5	9	-	6	
3	Simalungun	Panei	14	3	10	-	1	
		Bandar	6	1	5	-	-	
Jumlah			106	16	70	-	19	

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penyuluh responden dari tiga kabupaten bervariasi antara tingkat SLTA, Diploma sampai S1. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penyuluh pada tingkat SLTA sebanyak 37 orang atau setara dengan 34,9 (%), tingkat pendidikan Diploma II/Diploma III sebanyak 5 orang atau 4,7 % sedangkan tingkat pendidikan DIV/S1 sebanyak 64 orang atau 60,4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa tingkat umur penyuluh dari tiga kabupaten bervariasi. Hal ini dapat dilihat bahwa umur penyuluh responden antara 20 – 30 tahun berjumlah 13 orang atau setara (12,26 %), umur 31 – 40 tahun sebanyak 44 orang (41,5 %), umur 41 – 50 thn sebanyak 31 orang (29,2 %) dan 51 -60 tahun sebanyak 18 orang (16,9 %) sehingga usia penyuluh dominan antara 35 – 56 tahun atau sekitar 70,7 (%). Dari data terlihat bahwa penyuluh di tiga kabupaten sampel terlihat sebagian besar penyuluhnya masuk didominasi usia produktif dan sebagian penyuluh sudah memasuki usia pensiun terutama penyuluh PNS sehingga jumlah penyuluh

ke depan akan semakin berkurang. Menurut Djasmin (1985) dalam Suprpto (2004) bahwa usia manusia dapat menghambat proses belajar bagi orang dewasa. Dengan meningkatnya usia terjadi kemunduran fisik, seperti penglihatan berkurang, pendengaran berkurang dan lain-lain.

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa masa kerja penyuluh responden di wilayah sampel dalam melakukan kegiatan penyuluhan terhadap petani sangat bervariasi. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar penyuluh dengan masa kerja antara 6-10 tahun sebanyak 70 orang atau sekitar 66 % , penyuluh dengan masa kerja > 21 tahun berjumlah 19 orang atau 17,9 % dan masa tugas 0-5 tahun sebanyak 16 orang (15,1%). Masa kerja penyuluh menunjukkan lama penyuluh menduduki jabatan

fungsional sebagai penyuluh pertanian. Masa kerja sebagai salah satu faktor penting karena semakin lama masa kerja, penyuluh pertanian akan semakin menguasai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sehingga akan semakin matang dan berpengalaman dalam melaksanakan fungsi tugasnya. Pengalaman kerja membuat para pekerja lebih produktif, dan bersamaan dengan kemampuan kerja menentukan kinerja kerja (Schmidt *et al.*, 1986).

Lazimnya sebagai seorang penyuluh semakin lama melakukan tugas penyuluhan maka semakin banyak teknologi yang dikuasai dan akan disampaikan kepada petani. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini hampir diseluruh daerah penyuluh menghadapi masalah yakni kecilnya kesempatan penyuluh untuk dapat mengikuti kegiatan yang sifatnya meningkatkan profesionalisme mengikuti pendidikan yang lebih tinggi atau mengikuti pelatihan atau kegiatan lainnya. Penyuluh berperan sebagai agen pembaharu (change agent) dan sebagai sumber informasi dan teknologi yang akan

Tabel 6. Data Jarak Domisili PPL ke WKPP

No	Kabupaten	Nama BPP	Jlh Penyuluh (orang)	Jarak antara domisi penyuluh ke WKPP (km)			
				0 - 10	11- 20	21-30	> 31
1	Deli Serdang	Hamp. Perak	11	8	-	2	1
		Jaharun	17	15	-	-	-
2	Serdang Bedagai	Pem. Sijonam	38	32	2	-	4
		Berohol	20	16	1	1	2
3	Simalungun	Panei	14	12	2	-	-
		Bandar	6	6	-	-	-
Jumlah			106	89	5	3	7

Sumber : Data Primer

Tabel 7. Data Kepemilikan Lahan Oleh Petani Responden (Ha)

No	Kabupaten	Nama BPP	Jlh petani responden (orang)	Luas areal yang dikelola petani (ha)				
				0,1 -0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5- 2	> 2
1	Deli Serdang	Hamp. Perak	26	7	4	3	7	5
		Jaharun	30	13	15	1	1	-
2	Serdang Bedagai	Pem. Sijonam	42	5	16	10	7	4
		Berohol	40	6	13	-	17	4
3	Simalungun	Panei	17	2	9	4	2	-
		Bandar	40	12	21	6	1	-
Jumlah			195	45	78	23	35	13
Presentase				23,1	40	11,8	17,9	6,7

Sumber : Data Primer

mentransfer kepada petani harus menguasai informasi dan teknologi yang banyak dan sifatnya uptodate sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi petani di lapangan. Dengan penguasaan informasi dan teknologi oleh penyuluh maka penyuluh akan mampu memberikan bimbingan kepada petani sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan petani.

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penyuluh yang ada di tiga kabupaten wilayah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluh berdomisi di WKPP atau sekitar WKPP dengan jarak domisili ke WKPP antara 0 – 10 km. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 dari 106 penyuluh sebanyak 89 orang (83,9 %) berdomisi di WKPP atau sekitar WKPP. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jarak maksimal 10 km dari WKPP seorang penyuluh masih dapat bertugas dengan baik dalam memberikan penyuluhan, melaksanakan kunjungan rutin dan pembinaan ke kelompok tani dengan jumlah kelompok tani per setiap penyuluh adalah maksimal 16 kelompok tani dengan arti bahwa setiap penyuluh dalam satu bulan bisa mengunjungi setiap kelompok 2 – 3 kali sebulan.

Jarak tempat tinggal juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang penyuluh pertanian. Penyuluh yang berdomisili dan sering berinteraksi dengan petani akan mempengaruhi kinerjanya dibandingkan

apabila penyuluh jauh dari lokasi tugasnya. Tempat tinggal penyuluh yang terlalu jauh dengan WKPP tempat penyuluh bertugas bisa menjadi penyebab penyuluh tidak mengetahui masalah yang dihadapi petani, karena petani tidak bisa menceritakan masalahnya kepada penyuluh. Selain itu, penyuluh juga akan mengeluarkan biaya yang lebih besar jika jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat penyuluh bertugas terlalu jauh, dan dapat menyebabkan keterlambatan hadir penyuluh.

Berdasarkan data pada tabel 7 dapat dijelaskan

bahwa tingkat kepemilikan lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan perkebunan yang dimiliki oleh petani pada umumnya antara 0,5 – 1 Ha dimiliki oleh 78 orang petani responden atau sekitar 40 % dan kepemilikan lahan > 2 Ha hanya dimiliki sedikit petani yakni sebanyak 13 orang atau sekitar 6,7 %, lalu diikuti kepemilikan lahan antara 0,1 – 0,5 Ha sebanyak 45 orang 23,1 %, kepemilikan 1,1 – 1,5 Ha dimiliki oleh 23 petani (11,8%) dan kepemilikan antara 1,5 – 2 ha sebanyak 35 petani (17,9 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani kita masih tergolong petani marginal yang memiliki lahan sedikit sehingga mereka sangat sulit untuk melakukan usaha tani skala bisnis sehingga sebagian besar petani hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Luas lahan garapan usahatani mempunyai arti yang sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan yang diterima petani. Luas lahan dapat mempengaruhi sikap petani dalam percepatan alih teknologi yang sesuai dengan skala ekonomis sehingga usahatani menjadi efisien. Luas lahan garapan yang sempit (Tabel 7) yang dimiliki oleh sebagian besar responden menyebabkan dalam menerapkan budidaya bersorientasi agribisnis belum optimal. Menurut Scott (1989,dalam Supartha, 2005) petani kecil memiliki tanah sawah antara 0,25 s.d. 0,50 ha dan atau tegalan 0,50 s.d. 1,00 ha. Dengan demikian, tidak mudah bagi petani kecil mempengaruhi pasar.

Kondisi Kelembagaan

Kelembagaan dari suatu penyuluhan di daerah itu sangat menentukan proses penyelenggaraan kegiatan penyuluhan tersebut dengan kata lain bahwa tingkat efektifitas dari penyuluhan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kelembagaannya. Berdasarkan hasil kajian di tiga kabupaten yakni Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun terdapat perbedaan penyelenggaraan penyuluhan di masing-masing wilayah tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di kabupaten Deli Serdang dimana sampai saat ini belum memiliki lembaga penyuluhan yang mengacu kepada UU-SP3K sehingga satminkal penyuluhan berada di Dinas Pertanian dan di masing-masing kecamatan terdapat KCD (Kantor Cabang Dinas) meskipun juga memiliki BPP, tetapi dalam perjalanannya di lapangan penyuluh lebih banyak bertanggungjawab kepada KCD dibandingkan dengan dengan BPP sehingga BPP tidak optimal menjadikan sebagai pusat simpul penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan berakibat bahwa tugas penyuluhan berjalan kurang optimal.

- Di Kabupaten Serdang Bedagai penyelenggaraan penyuluhan sudah mulai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek kelembagaan bahwa satminkal penyuluh sudah berada di lembaga penyuluhan mulai dari tingkat kabupaten berada di BP2KP (Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), ditingkat kecamatan memiliki BP3KP dan ini sudah mulai mengacu kepada UU-SP3K. Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan menjadikan BP3KP sebagai simpul penyelenggaraan kegiatan penyuluhan. Penyuluh di wilayah ini hampir sebagian besar sudah memiliki sarana dan prasarana mulai dari kendaraan, BOP, biaya demplot guna menunjang kegiatan penyuluhan. Selain itu dukungan pemerintah daerah sangat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di wilayah itu bahkan regulasi yang terkait dengan penyuluh lebih cepat ditanggapi dan ditindaklanjuti. Kabupaten Serdang Bedagai juga memiliki BPP Model seperti BPP Pematang Sijonam sehingga di BPP ini sudah dijadikan sebagai pusat simpul penyuluhan dan tersedia wahana pembelajaran bagi penyuluh dan petani melalui penerapan teknologi di areal percontohan BP3KP tersebut.

- Di Kabupaten Simalungun penyelenggaraan penyuluhan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari bentuk kelembagaan penyuluhan di daerah ini sudah mengacu pada UU-SP3K yakni menjadi BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan). BP4K di Simalungun termasuk lembaga penyuluhan pertama terbentuk di Sumatera. Sarana dan prasarana sudah baik baik dari gedung BPP yang sudah lengkap dengan prasarana seperti lahan percontohan, komputer, ruang pertemuan dan lain sebagainya. Selain itu penyuluh sebagian besar sudah memiliki kendaraan bermotor untuk memudahkan penyuluhan dalam melakukan kunjungan terhadap petani. Seluruh penyuluh yang ada di wilayah ini memiliki satminkal yang jelas yakni berada di BP4K.

Berdasarkan kondisi kelembagaan penyuluhan dari tiga kabupaten lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penyelenggaraan program penyuluhan bila ditinjau dari aspek kelembagaannya dengan kata lain bahwa kabupaten yang tidak mengacu lembaga penyuluhannya terhadap Undang-undang No 16 dalam menerapkan penyuluhan di lapangan tidak berbeda jauh atau tidak signifikan bila dibandingkan dengan kabupaten yang kelembagaan penyuluhan tidak mengacu kepada UU SP3K.

Masalah-Masalah Penyuluhan Pertanian Di Lapangan

Berdasarkan hasil riset dari tiga kabupaten menunjukkan bahwa berbagai masalah petani dan pertanian saat ini juga tengah dihadapi sebagian besar penyuluh sifatnya multikompleks, masalah tersebut diantaranya buruknya infrastruktur pertanian, iklim yang tidak menentu, lemahnya akses permodalan, lemahnya pemberdayaan petani dan pengusaha tani, lemahnya posisi tawar petani, masih belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah, kurangnya sarana prasarana penyuluhan serta segudang masalah lainnya yang menuntut penyelesaian secara cepat dan akurat. Berdasarkan hal tersebut, penyuluh saat ini diharapkan lebih kreatif, inovatif dan profesional dalam menyikapi berbagai program dan kebijakan yang perubahannya juga relatif cepat. Secara rinci permasalahan yang dijumpai dilapangan yang

mengakibatkan proses penyelenggaraan penyuluhan kurang berjalan dengan optimal yakni :

a. Permasalahan Dari Keadaan Petani

- Sebahagian besar petani tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan yang mereka hadapi sehingga mereka tidak mampu untuk memikirkan permasalahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki akibatnya petani mengalami keterbatasan terhadap berbagai akses baik itu akses informasi, akses teknologi, akses permodalan dan akses pasar.

- Sebagian besar petani kurang memiliki motivasi untuk mengubah perilaku karena perubahan yang diharapkan berbenturan dengan motivasi yang lain. Petani kurang termotivasi berusaha untuk merubah cara-cara tradisional ke arah modernisasi atau sifat pertanian yang subsistem kurang diarahkan untuk berorientasi pada pasar.

- Kepemilikan lahan yang relatif kecil atau rata-rata kurang dari 1 ha dan sedikit yang memiliki lahan lebih dari 1 ha sehingga dalam melakukan usahataniya petani mengalami kesulitan untuk orientasi pasar dengan tujuan peningkatan kesejahteraan agak sulit dan pada umumnya petani melakukan usaha tani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga

b. Permasalahan Dari Keadaan Penyuluh

- Jumlah tenaga penyuluh di lapangan saat ini semakin berkurang. Pertama, karena banyak Pemda memanfaatkan tenaga penyuluh sebagai tenaga struktural dan ketika dipindah ternyata tidak dilakukan pergantian. Kedua, banyak tenaga penyuluh oleh Pemda ditempatkan tidak sebagai tenaga penyuluh. Ketiga, banyak tenaga penyuluh memasuki pensiun dan tidak dilakukan regenerasi. Sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah desa akibat dari pemekaran daerah, maka jumlah penyuluh harus meningkat.

- Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh penyuluh relatif kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar penyuluh yang ada saat ini dilapangan hanya lulusan SLTA terutama yang THL-TBPP yang tidak memiliki latar belakang pertanian. Mereka dibekali ilmu pertanian yang cukup terbatas melalui diklat sehingga pengetahuan dan keterampilan yang

dimiliki mereka saat ini dianggap belum mampu untuk membantu petani dalam pemecahan masalahnya.

- Latar belakang pendidikan penyuluh baik pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal yang kurang memadai sehingga menjadi masalah dimana keberadaan penyuluh kurang dirasakan manfaatnya oleh petani. Kondisi ini disebabkan karena kecilnya kesempatan penyuluh untuk mengikuti pelatihan atau Diklat guna menambah pengetahuan dan keterampilan yang akan ditransfer kepada petani sebagai penerima manfaat khususnya di daerah-daerah yang kurang mendukung program pertanian.

- Keberadaan penyuluh saat ini kurang bersaing di mata petani. Hal ini disebabkan penyuluh belum mampu melakukan transfer informasi dan teknologi kepada petani yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

- Akibat keterbatasan sarana dan prasarana penyuluh sebahagian besar tidak melakukan demplot sebagai diseminasi teknologi pertanian yang merupakan wahana percontohan bagi petani. Keberhasilan diseminasi teknologi pertanian hasil penelitian dan pengkajian, sangat tergantung pada aktifitas tenaga penyuluh di lapangan dan berfungsinya lembaga penyuluhan di semua tingkatan, karena secara konsepsional penyuluh lapangan merupakan perantara dalam proses alih teknologi dari sumber teknologi kepada petani.

- Kesadaran penyuluh terhadap perubahan budaya petani yang relatif kurang sehingga petani sering menganggap keberadaan penyuluh kurang dibutuhkan.

c. Permasalahan Dari Pemangku Kebijakan atau Dinas Terkait

- Beberapa kendala yang ditemui di beberapa dinas terkait terkait dengan kebijakan yang mendukung dalam mensukseskan program penyuluhan saat ini antara lain :

- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

- Belum terpenuhinya kebutuhan penyuluhan baik secara kualitas maupun kuantitas, serta terbatasnya sarana dan prasarana seperti pengalokasi sarana dan prasarana yang tidak tepat sasaran.

- Regulasi dari para pemangku kebijakan di beberapa instansi terkait kurang berpihak kepada penyuluhan sehingga dalam proses penganggaran tidak terfasilitasi.

Harapan Penyuluh ke Depan

Untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan ke depan sehingga dapat berjalan dengan baik maka harapan dari penyuluh adalah :

- Dengan melakukan pertemuan minimal sekali dalam sebulan, dengan melibatkan semua pengurus kelompok tani diluar dari pertemuan rutin atau kunjungan penyuluh ke kelompok, sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi dan teknologi
- Penyuluh sebaiknya mengikuti pelatihan minimal setiap tahun sekali guna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan profesionalismenya sebagai penyuluh
- Penyuluh berharap ke depan tidak diberati dengan tugas-tugas administrasi yang sifatnya memberikan pelayanan seperti laporan kerja BPP, laporan bulanan dll sehingga penyuluh tetap bisa menjalankan tugas utamanya sebagai penyuluh yakni memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani dan kelompok tani.
- Peran penyuluh ke depan tidak hanya terbatas pada fungsi menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhannya, akan tetapi harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga penyuluhan yang diwakilinya dengan masyarakat sasaran, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah/lembaga penyuluhan yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Mardikanto, 1993.
- BOP yang tersedia lebih memadai sehingga cukup untuk operasional ke lapangan terlebih wilayah binaan terdiri dari beberapa desa dan lokasi yang berjauhan.

Rencana Model Penyuluhan ke Depan

Sesuai dengan catatan sejarah bahwa keberhasilan Indonesia mengantarkan menjadi

negara swasembada beras pada tahun 1984 dan merupakan prestasi Indonesia terbesar di mata dunia pada saat itu dengan mendapat penghargaan Nobel dari lembaga dunia FAO. Affandi, 1981 dan Mosher, 1981 mengatakan bahwa keberhasilan dalam meraih keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peranan penyuluhan dimana penyuluh mampu melakukan perubahan perilaku dari petani yakni menyadarkan petani bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, perlu usaha-usaha seperti yang telah digariskan dalam Panca Usaha Tani dan telah diterapkan dalam Bimas, INMAS lengkap dengan Intensifikasi pangan. Dalam melakukan penyuluhan menggunakan 3 pendekatan yang sering dilakukan yakni pertama, pendekatan perorangan seperti kunjungan, surat, telepon. Kedua, pendekatan kelompok seperti pertemuan, demonstrasi, karyawisata, perlombaan, diskusi, kursus tani dan ketiga pendekatan massal seperti radio, siaran televisi, wayang, brosur, leaflet, folder, poster, spandul, sandiwara dan lain-lain.

Di Indonesia ada tiga model penyuluhan pertanian yang pernah dilakukan yang dapat digunakan untuk *lesson learned* yakni :

1. Sistem kerja LAKUSUSI (Latihan Kunjungan dan Supervisi)
2. Sekolah Lapangan, dan
3. FMA (Farmer Manage Activities)

Penyelenggaraan penyuluhan di Indonesia masih berdiri sendiri dan belum ada suatu model atau sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama. Kondisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang berjalan saat ini belum merupakan suatu kesatuan sistem secara koordinasi, sinkronisasi program dan integrasi. Hubungan antara sumber teknologi sebagai pemasok pengadaan inovasi (*generating system*) dengan lembaga penyuluhan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab pada sistem penyampaian (*delivery system*) dan sistem penerimaan (*receiving system*) masih berdiri sendiri dalam merancang pola pengembangan inovasi teknologi yang dibutuhkan masyarakat petani atau sistem sosial.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Axinn, 1988 dalam Badan pengembangan SDM pertanian, 2003 mengatakan bahwa pada era otonomi daerah dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis, maka perlu perubahan sistem atau pendekatan penyuluhan pertanian dengan menggabungkan dari pendekatan partisipatif, pendekatan latihan patungan dan pendekatan kelembagaan pendidikan. Pendekatan gabungan

tersebut belum menggambarkan sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, sehingga *perlu koordinasi, kerjasama dan integrasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait lainnya secara berkelanjutan.*

Pendekatan tersebut menuntut para penyuluh untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kompetensi mereka agar mampu memahami kondisi petani (potensi dan permasalahan) dengan memperluas sasaran penyuluhan tidak hanya bagi lembaga produksi (kelompok tani) namun semua lembaga yang bergerak dalam kegiatan agribisnis di pedesaan sebagai satu kesatuan dalam melakukan pemberdayaan.

Transfer teknologi melibatkan peneliti, penyuluh dan petani. Dimana teknologi yang dihasilkan oleh peneliti ditransfer oleh penyuluh ke petani sesuai dengan prinsip-prinsip adopsi inovasi. Pada rezim orde baru, paradigma utama dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah menjadikan petani sebagai objek atau penerima pembangunan (*beneficery*), oleh karena itu kegiatan penyuluhan lebih berkonsentrasi pada sejauhmana penyuluh dapat meningkatkan produksi melalui aplikasi teknologi pertanian yang kadang tidak ramah lingkungan. Kebijakan ini berujung pada berhasilnya Indonesia dalam swasembada beras 1984. Pada era ini secara teori metode yang digunakan adalah LAKUSUSI, tetapi dalam prakteknya banyak belum sepenuhnya sesuai antara teori dan pelaksanaannya.

Dalam era reformasi dan otonomi saat ini, pekerjaan penyuluh bukan hanya menjadikan petani responsif terhadap inovasi, tetapi juga menjadikan mereka berdaya, mampu memutuskan sendiri terkait usaha tani yang dilakukan dan mampu mencari alternatif sumber informasi selain dari penyuluh. Penyuluh juga harus mampu melakukan pemberdayaan pada pelaku usaha tani, hal itu sesuai dengan konsep pertanian berbasis agribisnis. Artinya bahwa sasaran tugas penyuluh bukan hanya petani dan keluarganya tapi ditambah dengan pelaku usaha agribisnis dari hulu hingga hilir, termasuk di dalamnya sektor penunjang pertanian. Satu hal lagi yang tidak kalah penting, sesuai dengan Undang-undang SP3K nomor 16 tahun 2006, penyuluh juga harus mampu mengaplikasikan usaha pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh penyuluh ke depan selain kemampuan teknis

pertanian yang ekuivalen, tetapi penyuluh juga harus memiliki kompetensi :

- ✓ **Inisiatif dan memiliki komunikasi efektif, lobi dan advokasi.** Bagi beberapa penyuluh yang ditakdirkan memiliki kemampuan tersebut hal ini tidak jadi masalah, berbeda halnya dengan penyuluh yang kurang kapasitasnya, dan ini bisa menjadi masalah di lapangan. Oleh karena itu instansi yang membidangi penyuluhan juga harus mengupayakan pelatihan komunikasi, lobi, negosiasi dan sebagainya agar penyuluh mampu mengatasi masalah yang dihadapi.
- ✓ **Nilai tambah (added value) :** Meningkatkan nilai tambah suatu produk. Nilai tambah merupakan upaya untuk meningkatkan nilai atau harga dari sebuah produk dan ini memang tidak mudah, membutuhkan ide kreatif dan cara berfikir out of the box. Tapi bukan berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh penyuluh. Tantangan ke depan adalah pemenuhan dan diversifikasi pangan, oleh karena itu penyuluh juga diharapkan dapat mencari solusi bahan pangan alternatif yang dapat diterima oleh masyarakat.
- ✓ **Networking.** Penyuluh adalah perantara, perantara petani dan pemerintah, petani dan peneliti dan petani dengan pengusaha, penyuluh yang profesional adalah penyuluh yang memiliki kemampuan menggali dan mengembangkan jaringan kerja (*networking*). Jaringan yang tidak hanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan petani, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan penyuluh itu sendiri. Penyuluh yang menguasai informasi pasar, akan mempermudah petani dalam merencanakan usaha tani dan menjual produk yang dihasilkan petani. Penyuluh yang memiliki jaringan ke perusahaan-perusahaan swasta, tidak akan terlalu bergantung pada pemerintah, karena memiliki alternatif bantuan dan program. Penyuluh yang memiliki jaringan perbankan juga akan lebih mudah dalam mengakses permodalan, lebih luwes lagi jika penyuluh mampu menjadi avalis bagi kredit petani.

Apabila penyuluh memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh petani, maka penyuluh dalam menjalankan tugasnya di lapangan akan mampu sebagai (1) penyebar informasi/teknologi, (2) proses penerangan/ pemberi penjelasan, (3) proses

perubahan perilaku, (4) proses belajar, (5) penyuluh komunikasi pembangunan, (6) proses perubahan sosial, (7) proses rekayasa perubahan sosial, (8) proses pemasaran sosial, (9) proses pemberdayaan masyarakat, (10) proses peningkatan kapasitas serta (11) sebagai proses edifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka rencana Model penyuluhan yang akan dicetuskan dari hasil kajian ini adalah menggunakan metode “**LAKU KORSIVA**” atau *Latihan, Kunjungan, Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi*. Dari beberapa metode penyuluhan yang selama ini pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada bagian dari metode metode LAKUSUSI yang masih relevan atau layak untuk tetap digunakan sebagai metode penyuluhan pada saat ini meskipun pada era perkembangan teknologi dan informasi yakni dengan melakukan **LAKU** (Latihan dan Kunjungan) karena kedua hal ini merupakan hal yang pokok yang dilakukan oleh penyuluh dalam menjalankan fungsinya sebagai penyuluh, akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang mengakibatkan perubahan dalam berbagai bidang termasuk bidang pertanian maka perlu integrasi dengan perkembangan dan situasi saat sekarang ini yakni perlu adanya **KORSIVA** (*Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi*). Sebagai alasan pemilihan metode ini dengan mengingat bahwa semakin kompleksnya permasalahan penyuluhan yang dijumpai saat ini di lapangan, bukan saja masalah teknis tetapi juga non teknis oleh karena itu perlu koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, sehingga diharapkan semua pihak terkait dalam mensukseskan penyelenggaraan penyuluhan diharapkan dapat terjalin kerja sama dan saling bersinergi, terintegrasi serta berkelanjutan sehingga mampu menjadi satu kesatuan tim *problem solving* bagi petani, sehingga pelaksanaan program penyuluhan itu bersifat *Holistik* dan tidak lagi bersifat *partial* seperti yang berjalan selama ini.

Pemahaman dan penjabaran metode **LAKUKORSIVA** secara detail dapat diuraikan sebagai berikut :

LA = Pelatihan

Penyuluh pertanian diberikan pelatihan secara berkala/rutin terjadwal yakni sekali dalam dua minggu dan berkesinambungan. Tempat latihan di Balai Penyuluhan Kecamatan atau ditempat lain

yang oleh penyuluh pertanian. Proses latihan (belajar – mengajar) difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang menguasai materi, maupun narasumber dari instansi/lembaga terkait lainnya, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dinas terkait, perguruan tinggi, praktisi dan lainnya.

Materi latihan disesuaikan dengan hasil analisa kesenjangan kemampuan penyuluh dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelompok/gabungan kelompok, dan materi lain yang menyangkut pembangunan pertanian, yakni : 1) pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah; 2) pengembangan dan penguatan kelompok dan gabungan kelompok; 3) program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.

Metode pelatihan dengan pendekatan andragogy, pemecahan masalah dan dapat dikombinasikan pengamatan langsung dengan memanfaatkan lahan percontohan di BPP atau BP3KP sebagai suatu sarana pembelajaran. Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh sebaiknya penyuluh pertanian diberikan pelatihan secara berkala/rutin terjadwal misalnya sekali dalam dua minggu dan dilakukan secara berkesinambungan. Tempat latihan di laksanakan Balai Penyuluhan Kecamatan atau ditempat lain yang disepakati oleh penyuluh pertanian. Proses latihan (belajar – mengajar) difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang menguasai materi, maupun narasumber dari instansi/lembaga terkait lainnya, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dinas terkait, perguruan tinggi, praktisi, dan lainnya.

KU = Kunjungan

Penyuluh di Wilayah Kerjanya dapat membina 8 – 16 kelompok dan dijadwalkan mengunjungi setiap kelompok minimal sekali dalam dua minggu. Jadwal kunjungan penyuluh ke kelompok dapat disesuaikan dengan kesepakatan dengan kelompok. Bila penyuluh mempunyai wilayah kerja dengan lebih dari 8 kelompok, maka penyuluh dapat melakukan kunjungan lebih dari satu kelompok per harinya.

Materi kunjungan penyuluh ke kelompok, meliputi ; 1) teknologi tepat guna yang membantu kelompok/gabungan kelompok dalam memecahkan permasalahan usahatani; 2) pengembangan agribisnis berbasis komoditas

sumberdaya lokal; 3) pengembangan dan penguatan kelompok tani/gabungan kelompok tani; 4) program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.

Metode kunjungan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yaitu dengan anjingsana, pertemuan, diskusi petani untuk memecahkan permasalahan dalam pengembangan usahatani. Kunjungan dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan bersama antara penyuluh dengan kelompok tani. Kegiatan kunjungan dapat merupakan bagian dari kegiatan kursus, demonstrasi (cara dan hasil) dan sekolah lapang.

KO = Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi adalah merupakan usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi atau pihak-pihak terkait, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Sesuai dengan metode LAKUKORSIVA ini bahwa koordinasi tidak terlepas dari hubungan dengan pihak-pihak terkait sehingga program penyuluhan dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja yang dimaksud disini adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) yaitu tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi mengandung adanya keterpaduan dan dilakukan secara serasi dan simultan dari seluruh tindakan yang dilakukan, namun dalam aplikasinya dilapangan koordinasi merupakan kerjasama antar berbagai pihak baik lembaga penelitian, penyedia saprodi, lembaga permodalan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya mampu bekerjasama secara bersinergi dan berkelanjutan dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani. sehingga dapat disimpulkan betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna

SU = Supervisi

Supervisi dilakukan oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh di

wilayah kerja penyuluh (WKPP), sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan sebagai pengendalian agar kunjungan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan dan berjalan efektif dan efisien. Materi supervisi diperoleh dari laporan yang tercantum dalam buku kerja penyuluh, laporan kelompok tani/gabungan kelompok tani atau informasi lainnya yang membutuhkan adanya supervisi dari kepala Balai Penyuluh Kecamatan.

Melalui penerapan Metode LAKUKORSIVA ini juga didukung pemberdayaan BPP atau BP3K sebagai pusat simpul penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan karena kelembagaan penyuluhan ini dan penyuluh yang berhubungan langsung dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Kelembagaan penyuluhan kecamatan (BP3K) perlu terus ditingkatkan kinerjanya agar penyuluh yang berada di wilayah kerjanya secara profesional dalam mendampingi petani memecahkan permasalahannya dalam berusaha tani.

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK/BPP atau BP3KP) dikatakan berkinerja baik bila dapat melaksanakan tugas dengan baik yaitu : 1) menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota; 2) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; 3) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; 4) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 5) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan; 6) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BP3K atau BP3KP dalam melaksanakan tugas tersebut harus bekerjasama dengan lembaga terkait baik dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta. Tugas BP3KP yang terkait dengan profesionalisme penyuluh adalah; 1) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; 2) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

EVA = Evaluasi

Kegiatan evaluasi bukan berarti kegiatan yang bertujuan untuk mencari kesalahan yang terjadi

tetapi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana capaian kegiatan penyuluhan yang sudah dicapai pada batas waktu tertentu yang disesuaikan dengan perencanaan. Kesenjangan atau diskrepansi yang ditemui dari hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk pengambilan kebijakan ke depan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan di awal, ditengah ataupun diakhir kegiatan. Semakin sering dilakukan evaluasi semakin baik karena memberikan peluang untuk memperbaiki kesalahan yang ditemui di lapangan.

Dalam penyediaan informasi BPP atau BP3KP harus berkeja sama dengan sumber-sumber informasi seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Dinas terkait., kelembagaan penyuluhan pada wilayah administrasi di atasnya, perguruan tinggi, petani maju, swasta dan lainnya. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan, media cetak dan elektronik (radio, televisi dan internet). Penyebaran informasi dilakukan oleh penyuluh dengan tujuan informasi tersebut dapat menjawab permasalahan yang dihadapi petani dalam berusahatani. Agar arus informasi dan penyebarannya dapat berjalan berkesinambungan dan dapat memecahkan permasalahan pelaku utama dalam berusahatani, maka di BPK diterapkan sistem kerja LAKUKORSIVA (Latihan, Kunjungan, Koordinasi, Supervisi, dan Evaluasi).

Sistem kerja LAKUKORSIVA adalah pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan melalui pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan profesionalisme penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani/kelompok yang dilakukan secara terjadwal, melakukan koordinasi serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.

Sistem Kerja LAKUKORSIVA mempunyai aspek positif, yaitu:

- a) Penyuluh memiliki rencana kerja dalam setahun;
- b) Penyuluh mengunjungi petani secara teratur dan berkelanjutan;
- c) Penyuluh cepat mengetahui masalah yang ada di petani dan cepat memecahkannya dengan

adanya koordinasi yang bersinergi dengan berbagai pihak;

- d) Penyuluh secara teratur mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan;
- e) Penyuluhan yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kelompok;
- f) Penyelenggaraan penyuluhan mendapat supervisi dan pengawasan secara teratur.
- g) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan evaluasi untuk melihat capaian kegiatan penyuluhan apakah sesuai dengan perencanaan dan adanya rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Sifat-sifat yang harus dipunyai oleh penyuluh dengan menggunakan metode LAKUKORSIVA ini antara lain:

- 1) Mempunyai kecakapan menghadapi masyarakat sasaran penyuluhan,
- 2) Mempunyai kecakapan dalam menghadapi masyarakat umum,
- 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masyarakat sasaran penyuluhan,
- 4) Mempunyai sifat dan bakat yang cocok untuk bergaul.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan :

- 1) Bila dikaitkan dengan UU SP3K bahwa satu desa satu penyuluh maka ketiga daerah ini masih dikategorikan kekurangan penyuluh terlebih-lebih semakin berkurangnya jumlah penyuluh yang diakibatkan oleh penyuluh PNS memasuki usia pensiun..
- 2) Kompleksnya permasalahan di lapangan yang mengakibatkan kurang optimalnya penyelenggaraan penyuluhan selain masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai juga adanya permasalahan dari petani itu sendiri, penyuluh dan aparatur maupun dari pemangku kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian.
- 3) Kepemilikan lahan oleh petani yang jumlahnya kecil yakni rata-rata antara 0,5 -1 ha lebih dominan sehingga petani mengalami hambatan untuk meningkatkan usaha taninya dalam skala pasar atau bisnis, sehingga sebagai upaya untuk meningkatkan provitas harus dilakukan melalui penerapan teknologi yang tepat.

- 4) Bentuk kelembagaan yang ada di tiga daerah yang diteliti terdapat perbedaan sehingga memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan penyuluhan ataupun sistem penyuluhan yang diterapkan sebab regulasi dari pemerintah daerah di tiga kabupaten itu tidak sama sehingga dapat disimpulkan bahwa regulasi dari pemangku kebijakan juga sangat berpengaruh erat terhadap pembangunan pertanian khususnya penyuluhan.
- 5) Metode penyuluhan yang dihasilkan dari penelitian ini dalam mendukung berlakunya era Asean Economic Community (AEC) yakni metode LAKUKORSIVA (Latihan, Kunjungan, Koordinasi dan Komunikasi, Supervisi serta Evaluasi).
- 6) Penyelenggaraan penyuluhan di lapangan agar bisa berjalan lancar dan baik serta mampu memberikan manfaat demi peningkatan kesejahteraan petani, maka penyelenggaraan penyuluhan harus dilakukan secara Holistik dan tidak bersifat partial seperti yang dilakukan selama ini.

SARAN

- 1) Perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh berbagai pihak baik akademisi, peneliti maupun masyarakat umum agar metode ini lebih baik dan mampu diterapkan dalam skala yang lebih luas.
- 2) Perlu dilakukan koordinasi, komunikasi yang efektif bersinergi dan berkelanjutan dengan antara berbagai pihak terkait dalam upaya mendukung penyelenggaraan penyuluhan agar berjalan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas S. 1995. 90 Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. 2001. Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Partisipatif Spesifik Lokal. Deptan. Jakarta.
- Slamet M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press. Bogor.
- Sukino. 2013. Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Mafruhah, I. 2009. Multidimensi Kemiskinan. Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

_____. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.